

ABSTRAK

Pada masa pemilu, para calon legislatif membentuk organisasi non-partai dengan tujuan untuk menjaring suara disebut “tim sukses” yang memanfaatkan para kader partai tetapi tak luput juga bergantung pada tokoh masyarakat. Dengan tujuan mengetahui pola-pola patronase, klientelisme dan pemanfaatan jaringan etnisitas maupun identitas dimainkan dalam upaya pemenangan kandidat calon legislatif pada perhelatan pemilihan calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya pemenangan pada perhelatan pemilihan calon legislatif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019”

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patronase dan klientilisme adalah fenomena dengan politik demokrasi melekat, konteks elektoral kedaerahan klien dijadikan sebagai perilaku koruptif yang berbentuk transaksi yang berjalan dua sisi (supply dan demand). Pola hubungan patronase dan klientilisme demikian dengan cara memberikan sembako ataupun uang dengan hal ini sangat melanggar aturan dalam pemilihan suara calon legislatif berkampanye. Keberhasilan demokrasi dapat dilihat dari pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah reformasi terdapat UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik yang mengatur sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan usaha lain, bantuan dari anggaran Negara. Perlu diadakannya pendidikan politik untuk masyarakat dengan perayaratan alokasi secara khusus rekrutmen kaderisasi, beserta uji kemampuan terhadap calon legislatif sebagai penyeimbang akuntabilitas dan transparan anggaran.

Kata Kunci: Demokrasi, Patronase, Klientilisme, calon legislative

ABSTRACT

At the time of the elections, the legislative candidates formed a non-party organization with the aim of winning votes called a "success team" that utilizes party cadres but is also dependent on public figures. With the aim of knowing patterns of patronage, clientelism and exploitation of networks of ethnicity as well as identity played in an effort to win the candidate legislative candidate on the electoral contest of the legislature candidate. Based on the description above, then the researchers are interested in doing research on “ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019”.

The Research Method used is a normative legal research method that studies library materials and studies documents to answer legal issues, using an statute approach.

The results of this study show that the presence of patronage and clientilism is a phenomenon with an inherent political democracy, the electoral context of client independence is used as a corrupt behavior in the form of transactions that run on two sides. (supply dan demand). The pattern of patronage and clientilism of such a way of giving money or money with this is a serious violation of the rules in the election of the vote of the legislative candidate campaigning. The success of democracy can be seen from the elections held in accordance with the values of Pancasila. After the reforms there was Act No. 2 of 1999 on political parties that regulates the financial resources of political parties coming from membership allowances, other enterprise contributions, aid from the State budget. It is necessary to provide political education for the public with allocation payments specifically for the recovery of cadres, along with a test of capacity for legislative candidates as accountability balancers and transparency of budgets.

Keywords: democracy, patronage, clientilism, candidate legislative